

Kolaborasi Multipihak Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengelolaan Lingkungan Dan Penguatan Ekonomi Lokal

Septi Triyani, Ulina Ziila Zabrina*, Ruchma Masriyah, Annisa Eline Salsabila, Hafizh Muhammad Akbar, Muh Kemal Mursyidan Amin, Moh Sayful Zuhri

Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author: ulimaziila@student.uns.ac.id | ORCID: -

Article history

Received: 02/06/2026

Revised: 06/07/2026

Accepted: 03/08/2026

Available Online: 30/09/2026

Published: 30/09/2026

Abstract:

Rural development faces interconnected challenges involving social, environmental, and economic aspects that require collaboration among multiple stakeholders. This study aims to analyze multi-stakeholder collaboration in community empowerment in Desa Rawoh through environmental management and local economic strengthening during a community service program. A descriptive qualitative approach was employed using data obtained from observations, documentation, and records of interactions and discussions during the activities. The findings show that collaboration among the village government, university students, community groups, schools, and local business actors created participatory spaces through discussions, practical activities, knowledge transfer, and follow-up planning. Initial outcomes were observed in environmental management practices and economic capacity strengthening; however, these outcomes do not yet demonstrate long-term impacts on environmental conditions, income, or community welfare. Program sustainability depends on the ability of local actors to maintain coordination, role distribution, monitoring, and commitment after the community service program ends.

Keywords: Multi-stakeholder Collaboration; Community Empowerment; Environmental Management; Local Economic Strengthening; Sustainability

Abstrak:

Pembangunan desa menghadapi persoalan yang saling berkaitan antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan masyarakat Desa Rawoh melalui pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal dalam pelaksanaan KKN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, serta catatan interaksi dan diskusi selama kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, mahasiswa, kelompok masyarakat, sekolah, dan pelaku usaha membentuk ruang partisipasi melalui diskusi, praktik, transfer pengetahuan, dan penyusunan tindak lanjut. Capaian awal terlihat pada pengelolaan lingkungan dan penguatan kapasitas ekonomi, tetapi belum menunjukkan dampak jangka panjang terhadap kondisi lingkungan, pendapatan, maupun kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program bergantung pada kemampuan aktor lokal mempertahankan koordinasi, pembagian peran, monitoring, dan komitmen setelah KKN berakhir.

Kata Kunci: Kolaborasi multipihak; Pemberdayaan masyarakat; Pengelolaan lingkungan; Ekonomi lokal; Keberlanjutan

© 2026 The Authors.

Licensed under a

Creative Commons

Attribution-ShareAlike 4.0

International License



PENDAHULUAN

Pembangunan desa menghadapi persoalan yang saling beririsan antara kebutuhan sosial, kondisi lingkungan, dan penguatan ekonomi sehingga tidak selalu dapat ditangani oleh satu lembaga. Pemerintah desa memiliki posisi penting dalam mengarahkan pembangunan, tetapi keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan jangkauan kelembagaan membuat keterlibatan aktor lain diperlukan. Dalam kerangka *collaborative governance*, penyelesaian persoalan publik berlangsung melalui interaksi pemerintah dan pemangku kepentingan nonpemerintah untuk membangun pemahaman dan tindakan bersama. Karena itu, kolaborasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga dengan kemampuan berbagai aktor menggabungkan sumber daya dan kepentingannya dalam mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Perspektif tersebut masih relevan dalam penelitian kolaborasi kontemporer, karena keberlanjutan proses kolaboratif bergantung pada kemampuan aktor membangun kepercayaan, pembelajaran bersama, dan mekanisme interaksi yang mendukung kerja sama antaraktor (Vihma & Toikka, 2021).

Kolaborasi tersebut berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat karena masyarakat perlu ditempatkan sebagai aktor dalam proses pembangunan, bukan sekadar penerima program. Partisipasi yang bermakna mencakup ruang untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, terlibat dalam pelaksanaan, dan mengambil bagian dalam tindak lanjut kegiatan. Damayanti & Syarifuddin (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa belum selalu berlangsung secara substantif dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat juga berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan, jaringan, organisasi lokal, dan sumber daya sosial untuk mendukung tindakan kolektif (Sarjiyanto et al., 2024).

Kebutuhan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Grobogan yang menempatkan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah, peningkatan kualitas usaha mikro, serta pengembangan ekonomi dari tingkat desa sebagai bagian dari agenda pembangunan. Kebijakan daerah juga menempatkan kelestarian lingkungan dan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2021). Dalam sektor pertanian, Iyoega et al. (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai aktor diperlukan dalam pembangunan, sementara ketidakseimbangan peran dapat menghambat proses kolaborasi.

Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu ruang penting bagi pemberdayaan di tingkat desa. Sampah plastik memiliki sifat persisten dan dapat mengalami fragmentasi menjadi partikel yang lebih kecil ketika tidak dikelola dengan baik (Cai et al., 2023). Karena itu, pengelolaan sampah tidak cukup mengandalkan teknologi, tetapi juga memerlukan pendidikan, partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan, dan kemitraan antarpihak (Yeboaa et al., 2025). Pada tingkat komunitas, keterlibatan pemimpin lokal dan masyarakat dalam pemilahan, penerapan 3R, pengomposan, dan pengelolaan bank sampah menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat (Rachman et al., 2020).

Pengelolaan lingkungan juga dapat beririsan dengan penguatan kapasitas ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan material yang sebelumnya kurang termanfaatkan. Kemitraan perguruan tinggi dan desa dapat menjadi ruang transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat (Sujito & Anggraini, 2025). Pada sisi ekonomi, kemampuan pelaku usaha dalam menjangkau konsumen juga menjadi bagian dari

kapasitas yang perlu diperkuat. Strategi pemasaran digital melalui media sosial dan *marketplace* dapat memperluas komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen (Kamkankaew et al., 2022).

Kondisi tersebut ditemukan di Desa Rawoh, yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis pertanian dan usaha mikro masyarakat, sekaligus menghadapi persoalan pengelolaan sampah. Sebagian masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani, sedangkan usaha seperti produksi tempe dan keripik pisang menjadi potensi ekonomi lokal. Di sisi lingkungan, bank sampah yang pernah dibentuk belum berjalan secara konsisten, sementara kebiasaan membakar atau membuang sampah ke kali masih ditemukan. Pelaksanaan pemberdayaan kemudian diarahkan pada penguatan praktik pengelolaan limbah dan sampah serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pengenalan pemasaran digital. Berbagai kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah desa, kelompok masyarakat, sekolah, pelaku usaha, mahasiswa, dan warga dalam bentuk koordinasi, diskusi, praktik, dan tindak lanjut sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan.

Penelitian terdahulu telah membahas *collaborative governance* dalam pembangunan sektor tertentu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta kemitraan perguruan tinggi dan desa (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Iyoeaga et al., 2020; Rachman et al., 2020; Sujito & Anggraini, 2025). Namun, kajian yang mempertemukan proses kolaborasi multipihak dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal secara bersamaan pada tingkat desa masih relatif terbatas. Penelitian ini karena itu tidak menempatkan KKN semata sebagai rangkaian kegiatan, tetapi menganalisisnya melalui keterlibatan aktor, mekanisme kolaborasi, partisipasi, transfer pengetahuan, capaian awal, serta tantangan keberlanjutan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan masyarakat Desa Rawoh melalui pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal, dengan menelaah bentuk keterlibatan aktor, mekanisme kolaborasi, capaian awal, serta tantangan keberlanjutan program.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan masyarakat Desa Rawoh. Fokus analisis mencakup keterlibatan aktor, koordinasi, pembagian peran, partisipasi masyarakat, transfer pengetahuan, capaian awal, dan keberlanjutan program dalam konteks pelaksanaan KKN. Kerangka *collaborative governance* dan pemberdayaan masyarakat digunakan sebagai perangkat kategorisasi serta interpretasi data, terutama untuk membaca proses keterlibatan, tindakan bersama, partisipasi, dan penguatan kapasitas masyarakat (Ansell & Gash, 2008; Damayanti & Syarifuddin, 2020; Sarjiyanto et al., 2024). Penelitian dilaksanakan di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam konteks pelaksanaan KKN tahun 2026. Analisis difokuskan pada dua ranah, yaitu pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal. Ranah lingkungan mencakup pengelolaan limbah dan sampah, bank sampah, pemanfaatan material bekas, serta edukasi lingkungan. Ranah ekonomi meliputi penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pemasaran digital dan promosi produk. Fokus tersebut ditetapkan berdasarkan permasalahan dan potensi desa yang terdokumentasi selama pelaksanaan KKN.

Data penelitian meliputi data lapangan dan data dokumenter. Data lapangan diperoleh melalui pengamatan selama kegiatan, interaksi dan diskusi dengan peserta, serta catatan mengenai keterlibatan aktor, partisipasi, kendala, dan tindak lanjut. Data dokumenter meliputi LPJ KKN,

dokumentasi pelaksanaan, dokumen desa atau kebijakan yang relevan, serta literatur ilmiah sebagai bahan analisis dan pembandingan. LPJ KKN digunakan sebagai dokumen yang merekam proses kegiatan, bentuk keterlibatan pihak yang terlibat, hasil langsung, dan rencana tindak lanjut program. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi, dan pencatatan hasil interaksi atau diskusi selama kegiatan berlangsung. Pengamatan digunakan untuk mengidentifikasi keterlibatan aktor, interaksi antarpihak, pembagian peran, praktik, dan respons peserta. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri proses pelaksanaan dan hasil awal kegiatan, sedangkan catatan interaksi dan diskusi digunakan untuk mengidentifikasi masukan, kendala, serta mekanisme tindak lanjut yang muncul selama pelaksanaan program. Analisis dilakukan melalui pengorganisasian, kategorisasi tematik, interpretasi, dan perbandingan data.

Informasi dari catatan kegiatan, pengamatan, dokumentasi, dan interaksi dikelompokkan berdasarkan aktor dan peran, *engagement*, partisipasi, transfer pengetahuan, *capacity for joint action*, capaian awal, kendala, dan keberlanjutan. Selanjutnya, kategori tersebut ditafsirkan menggunakan kerangka *collaborative governance* dan *community empowerment*. Unsur *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* digunakan untuk membaca proses kolaborasi, sedangkan konsep partisipasi dan pemberdayaan digunakan untuk menilai posisi masyarakat dalam pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Emerson et al., 2012; Sarjiyanto et al., 2024). Temuan kemudian dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan untuk melihat pola dan karakteristik kolaborasi dalam konteks Desa Rawoh. Analisis dibatasi pada proses, hasil langsung, dan kapasitas awal yang terdokumentasi sehingga tidak digunakan untuk menyimpulkan dampak jangka panjang. Konsistensi informasi diperiksa melalui perbandingan catatan kegiatan, dokumentasi, pengamatan, serta informasi mengenai peran dan tindak lanjut yang tercatat dalam LPJ. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum informasi digunakan dalam interpretasi. Penelitian tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan pendapatan, volume sampah, prevalensi stunting, produktivitas pertanian, atau perubahan kondisi lingkungan jangka panjang.

HASIL DAN DISKUSI

Aktor dan Struktur Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Rawoh melibatkan beberapa aktor dengan peran yang berbeda. Pemerintah desa, mahasiswa, kelompok tani, KWT, PKK, RT, Karang Taruna, sekolah, pelaku UMKM, dan masyarakat terlibat sesuai kebutuhan kegiatan. Pola tersebut terlihat pada GEMA PELITA DESA, yang diawali koordinasi dengan Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani, Gapoktan, dan KWT. Kepala Desa terlibat dalam konsultasi dan penetapan kegiatan, sedangkan kelompok tani menjadi penghubung dengan anggota masyarakat. Anggota Gapoktan dan KWT kemudian terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan. Struktur ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memfasilitasi hubungan antara mahasiswa dan kelompok masyarakat.

Peran tersebut dapat dibaca sebagai kepemimpinan fasilitatif karena membantu mempertemukan aktor dan mengarahkan koordinasi pada tingkat lokal (Ansell & Gash, 2008). Keterlibatan pimpinan kelompok masyarakat juga menyediakan akses terhadap jaringan dan pengetahuan lokal, yang menjadi bagian dari kapasitas awal untuk bertindak bersama (Emerson et al., 2012). Pola serupa muncul dalam revitalisasi Bank Sampah melalui keterlibatan perangkat desa, RT, PKK, Karang Taruna, dan masyarakat.

Namun, derajat keterlibatan tidak seragam. GALA TOGA, misalnya, lebih banyak memperlihatkan kemitraan antara mahasiswa dan institusi sekolah. Karena itu, jumlah aktor tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyebut suatu kegiatan sebagai kolaborasi. Interaksi, kontribusi, pemberian masukan, pembagian peran, dan keterlibatan dalam tindak lanjut lebih menentukan kualitas partisipasi (Damayanti & Syarifuddin, 2020). Struktur yang terbentuk selama KKN karena itu lebih tepat dipahami sebagai struktur kolaboratif awal: ruang interaksi dan tindakan bersama telah tersedia, tetapi sebagian mekanismenya masih bertumpu pada fasilitasi mahasiswa.

Kolaborasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan menjadi arena yang memperlihatkan hubungan antara pengetahuan, partisipasi, dan tindakan bersama. GEMA PELITA DESA dan revitalisasi Bank Sampah menjadi dua bukti paling kuat. Pada GEMA PELITA DESA, koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok tani dilanjutkan dengan diskusi serta praktik pengolahan limbah pertanian. Kompos yang dihasilkan dimanfaatkan pada tanaman dan diarahkan untuk ditindaklanjuti melalui kelompok masyarakat. Rangkaian konsultasi, pertukaran masukan, penyampaian pengetahuan, dan praktik bersama memperlihatkan adanya proses interaksi serta pembelajaran antaraktor dalam kolaborasi (Vihma & Toikka, 2021). Proses menghasilkan kompos dapat dipahami sebagai *small wins* karena menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor telah menghasilkan tindakan konkret, tetapi belum dapat menjadi bukti peningkatan produktivitas pertanian (Ansell & Gash, 2008).



Gambar 1. Workshop Pembuatan Kompos



Gambar 2. Foto Bersama Anggota Gapoktan dan KWT

Pembuatan POC dan BIOAKSI RAWOH memperlihatkan pola serupa. Peserta memperoleh pengalaman langsung mengolah limbah organik dan membuat biopori, sedangkan leaflet membantu mengingat kembali tahapan kegiatan. Proses fermentasi POC masih membutuhkan pemantauan, sementara penerapan biopori dipengaruhi kondisi lokasi dan pemeliharaan. Capaian kedua kegiatan tersebut karena itu lebih tepat dipahami sebagai penguatan pengetahuan dan keterampilan teknis awal.



Gambar 3 Pemasangan Pipa Biopori



Gambar 4 Workshop Praktik Pembuatan POC

Persoalan yang lebih kompleks muncul pada Rawoh Peduli Bersih. Bank Sampah sebelumnya tidak berjalan optimal sehingga revitalisasi diarahkan bukan hanya pada pemilahan dan 3R, tetapi juga pada pembagian peran antara perangkat desa, PKK, RT, Karang Taruna, dan masyarakat. Pembahasan ecobrick, mekanisme 1 RT 1 Ecobrick, sistem estafet botol, dan monitoring menunjukkan bahwa pengelolaan sampah diperlakukan sebagai persoalan pengorganisasian, bukan semata persoalan pengetahuan. Rancangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengaturan kelembagaan, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi antaraktor dalam menjalankan tindakan bersama (Ansell & Gash, 2008; Vihma & Toikka, 2021). Temuan ini sejalan dengan Rachman et al. (2020) mengenai pentingnya kepemimpinan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Konteks Desa Rawoh menambahkan persoalan kelembagaan karena sistem yang sebelumnya ada belum berjalan optimal.

Pada lingkungan sekolah, GALA TOGA dan PILAH PETUALANG menggunakan pembelajaran berbasis praktik. GALA TOGA melibatkan 41 siswa untuk membuat pot dari bahan bekas dan menanam tanaman obat dengan pendampingan guru, sedangkan PILAH PETUALANG

mengenalkan pemilahan sampah melalui kegiatan edukatif. Kedua kegiatan memperlihatkan bahwa pengalaman langsung memudahkan transfer pengetahuan, tetapi keterlibatan dalam satu kegiatan belum cukup untuk menyatakan perubahan perilaku jangka panjang. Secara lintas program, temuan lingkungan memperlihatkan bahwa pengetahuan lebih mudah diterjemahkan menjadi tindakan ketika disertai praktik, sementara keberlanjutan membutuhkan pengaturan dan pemeliharaan setelah kegiatan berakhir.



Gambar 5. Hasil Kreasi Tempat Sampah dari Ember Bekas oleh siswa SD Negeri 1 Rawoh



Gambar 6. Praktik pembuatan dan penghiasan pot tanaman obat dari limbah galon plastik bekas oleh siswa SD Negeri 2 Rawoh

Pemberdayaan Masyarakat dan Capacity for Joint Action

Pemberdayaan di Desa Rawoh berkembang secara bertahap, dari kehadiran dan penerimaan informasi menuju pemberian masukan, praktik, dan keterlibatan dalam mekanisme tindak lanjut. GEMA PELITA DESA memperlihatkan bentuk partisipasi yang relatif lebih substantif karena anggota Gapoktan dan KWT terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan. Revitalisasi Bank Sampah menunjukkan keterlibatan yang lebih jauh ketika masyarakat ikut membahas pembagian peran dan mekanisme pengumpulan ecobrick. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak berhenti pada kehadiran, meskipun belum cukup untuk menyatakan kemandirian penuh (Damayanti & Syarifuddin, 2020).

Pola transfer pengetahuan juga terlihat pada RAWOH CERDAS yang melibatkan pemerintah desa, mahasiswa, PKK, ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita. Kegiatan memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting, pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, serta pemanfaatan pangan lokal melalui penyampaian materi, leaflet, dan contoh pangan olahan.

Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan di Desa Rawoh juga menjangkau domain sosial melalui edukasi dan partisipasi masyarakat. Namun, capaian yang tersedia masih berada pada tingkat penguatan pengetahuan awal sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan perubahan prevalensi stunting atau dampak kesehatan jangka panjang.

Kerangka *capacity for joint action* dalam *collaborative governance* Emerson et al. (2012) membantu membaca kapasitas awal yang mulai terbentuk melalui empat unsur, yaitu *institutional arrangements*, *leadership*, *knowledge*, dan *resources*. Pada konteks Desa Rawoh, *institutional arrangements* terlihat melalui rancangan pembagian tugas antaraktor, *leadership* melalui peran pemerintah desa dan pimpinan kelompok masyarakat, *knowledge* melalui kegiatan workshop dan praktik, sedangkan *resources* berasal dari bahan lokal, fasilitas desa, kelompok masyarakat, peserta, dan mahasiswa. Unsur-unsur tersebut telah tersedia pada tahap awal, tetapi belum seluruhnya berkembang menjadi sistem kelembagaan yang mapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas kolaboratif tidak hanya bergantung pada tersedianya sumber daya, tetapi juga membutuhkan proses pembelajaran, kepercayaan, dan mekanisme interaksi yang dapat mempertahankan kerja sama antaraktor (Vihma & Toikka, 2021). Temuan ini juga sejalan dengan Sarjiyanto et al. (2024), yang menempatkan organisasi komunitas, jaringan, partisipasi, pengetahuan lokal, dan kapasitas sebagai unsur yang saling menopang dalam pemberdayaan masyarakat.

Mahasiswa dalam proses tersebut terutama berfungsi sebagai fasilitator, penghubung, dan pembawa pengetahuan. Peran ini membantu membuka ruang interaksi dan pengalaman praktik, tetapi dibatasi oleh masa KKN. Selama tindak lanjut masih membutuhkan kehadiran mahasiswa, kapasitas lokal belum sepenuhnya mengambil alih fungsi pelaksanaan. Pemberdayaan karena itu lebih tepat dipahami sebagai proses pembentukan kapasitas untuk bertindak bersama daripada kondisi kemandirian yang telah selesai.

Penguatan Ekonomi Lokal dan Transfer Pengetahuan

Pada ranah ekonomi, intervensi terutama menghasilkan penguatan pengetahuan dan keterampilan pemasaran digital. Lapak Digital memperkenalkan pelaku UMKM pada *marketplace*, pengelolaan toko digital, unggah produk, *live selling*, dan perangkat pendukung pemasaran, sedangkan WhatsApp Business dikenalkan sebagai sarana komunikasi produk. Capaian tersebut berada pada tahap *initial capacity*, yaitu tahap awal pembentukan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Pemanfaatan pemasaran digital dapat memperluas komunikasi dengan konsumen dan membuka peluang peningkatan jangkauan pasar, tetapi penerapannya membutuhkan proses adaptasi, praktik, dan konsistensi dari pelaku usaha (Kamkankaew et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, transformasi digital pada UMKM umumnya berlangsung secara bertahap melalui digitalisasi fungsi tertentu, seperti pemasaran dan penjualan, sesuai dengan tingkat kesiapan teknologi serta kemampuan adaptasi masing-masing usaha (Priyono et al., 2020). Selain faktor teknologi, keberhasilan adopsi digital marketing juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kemampuan teknis, dan dukungan pendampingan agar teknologi dapat digunakan secara berkelanjutan (Andika et al., 2021).

Rawoh Digital Story memperkuat pola tersebut melalui pengenalan fotografi produk menggunakan telepon genggam dan prinsip *Rule of Thirds* sebagai upaya meningkatkan

kemampuan dasar penyajian produk secara digital. Perbedaan kemampuan teknologi, ketersediaan perangkat, dan waktu praktik menjadi kendala dalam proses penerapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga membutuhkan proses pembelajaran, praktik, dan pendampingan untuk membangun kapasitas individu maupun komunitas secara berkelanjutan (Eger et al., 2018). Dengan demikian, capaian kegiatan ini lebih tepat dipahami sebagai penguatan kapasitas awal yang memberikan dasar bagi pengembangan keterampilan lanjutan, bukan sebagai bukti perubahan ekonomi yang telah sepenuhnya terbentuk.

Hubungan antara ranah lingkungan dan ekonomi juga tampak melalui pemanfaatan bahan bekas serta pengolahan limbah menjadi material yang memiliki nilai guna. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *circular economy* yang menekankan pengurangan limbah, pemanfaatan kembali sumber daya, serta penciptaan nilai melalui keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas (Sujito & Anggraini, 2025). Namun, tanpa adanya pengukuran langsung terhadap perubahan penjualan atau pendapatan, capaian tersebut tetap diposisikan sebagai penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi lokal, bukan sebagai bukti dampak ekonomi yang telah tercapai.

Capaian Awal, Hambatan, dan Keberlanjutan Kolaborasi

Secara terpadu, capaian kegiatan dapat dilihat pada tiga tingkat, yaitu transfer pengetahuan, pembentukan keterampilan awal, dan penguatan pengaturan kelembagaan. Transfer pengetahuan dilakukan melalui kegiatan edukasi lingkungan dan pemasaran digital, sedangkan keterampilan awal dibangun melalui praktik pengomposan, pembuatan POC, biopori, ecobrick, pemanfaatan material bekas, serta promosi produk UMKM. Di sisi kelembagaan, koordinasi antaraktor, pembagian peran, forum diskusi, dan rancangan monitoring menunjukkan adanya proses awal pembentukan mekanisme kerja bersama. Capaian tersebut tidak dipahami sebagai keberhasilan akhir program, tetapi sebagai *small wins*, yaitu hasil awal dalam proses kolaborasi yang dapat membangun kepercayaan, kapasitas, dan pijakan bagi tindakan kolektif berikutnya (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks ini, *small wins* dibuktikan melalui munculnya kemampuan awal masyarakat untuk memahami praktik pengelolaan lingkungan, mencoba menerapkan keterampilan baru, serta terlibat dalam mekanisme koordinasi bersama, bukan hanya berdasarkan terlaksananya rangkaian kegiatan KKN.

Keberlanjutan menjadi batas penting dalam memahami capaian tersebut. Hasil awal yang diperoleh selama kegiatan belum dapat langsung dipandang sebagai dampak jangka panjang karena keberlanjutan suatu sistem sosial dan lingkungan bergantung pada kemampuan aktor lokal untuk mempertahankan fungsi, beradaptasi terhadap perubahan, dan mengembangkan praktik yang telah diperkenalkan (Marchese et al., 2018). Hambatan yang ditemukan berkaitan dengan keterbatasan waktu partisipasi masyarakat, perbedaan kapasitas teknis, serta belum optimalnya mekanisme kelembagaan dan monitoring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transfer pengetahuan tidak selalu langsung berubah menjadi penerapan berkelanjutan karena masyarakat masih membutuhkan proses latihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas.

Dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, partisipasi juga tidak otomatis menghasilkan keberlanjutan apabila belum diikuti oleh kepemimpinan lokal, pembagian peran, dan mekanisme pengelolaan yang mampu dipertahankan. Studi Rachman et al. (2020)

menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan peran pemimpin lokal dalam menjaga motivasi, koordinasi, serta keberlanjutan praktik lingkungan. Hal serupa terlihat pada Desa Rawoh, bahwa kontribusi mahasiswa terutama berperan sebagai fasilitator dalam membuka ruang interaksi dan transfer pengetahuan, sedangkan keberlanjutan program bergantung pada kemampuan aktor lokal untuk melanjutkan praktik tersebut setelah pendampingan berakhir.

Ketegangan utama dalam proses pemberdayaan terletak pada hubungan antara partisipasi, pengetahuan, dan kelembagaan. Partisipasi selama kegiatan belum selalu menunjukkan terbentuknya kebiasaan yang bertahan dalam jangka panjang. Pengetahuan yang diperoleh masyarakat juga membutuhkan proses internalisasi agar dapat diterapkan dalam kondisi nyata. Selain itu, kolaborasi multipihak tidak cukup hanya melalui keterlibatan berbagai pihak, tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan yang mampu mengatur pembagian peran, koordinasi, dan keberlanjutan kegiatan. Sujito & Anggraini (2025) menunjukkan bahwa kemitraan kampus–desa dalam pengelolaan lingkungan membutuhkan penguatan kapasitas lokal, karena keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh intervensi eksternal, tetapi juga oleh kemampuan komunitas dalam membangun praktik dan kelembagaan yang adaptif.

Pada aspek ekonomi lokal, pendampingan pemasaran digital dan promosi produk juga masih berada pada tahap penguatan kapasitas awal. Pengetahuan mengenai media digital belum dapat langsung dipandang sebagai peningkatan ekonomi karena penerapannya membutuhkan konsistensi, keterampilan, dan dukungan berkelanjutan dari pelaku usaha. Keberhasilan suatu inisiatif berkelanjutan juga dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder dalam mempertahankan nilai dan tujuan bersama, bukan hanya keberhasilan aktivitas pada tahap awal (Srivastava et al., 2019). Oleh karena itu, capaian Desa Rawoh lebih tepat dipahami sebagai proses pembentukan kapasitas lokal untuk bertindak bersama, membangun koordinasi, dan mengembangkan kemampuan adaptasi, bukan sebagai hasil akhir yang telah menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan dan ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan masyarakat Desa Rawoh terbentuk melalui keterlibatan pemerintah desa, mahasiswa, kelompok masyarakat, sekolah, dan pelaku usaha dengan peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kolaborasi tersebut membuka ruang partisipasi masyarakat yang pada beberapa program berkembang dari penerimaan informasi menjadi diskusi, praktik, pemberian masukan, dan penyusunan tindak lanjut. Pada ranah pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal, kegiatan menghasilkan capaian awal berupa praktik pengolahan limbah, pemanfaatan kembali material, serta penguatan pengetahuan mengenai pemasaran digital dan promosi produk. Capaian tersebut menunjukkan adanya pembentukan kapasitas awal dan tindakan bersama, tetapi belum dapat dijadikan bukti perubahan jangka panjang pada kondisi lingkungan, pendapatan, maupun kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberlanjutan program masih bergantung pada kemampuan aktor lokal untuk mempertahankan pembagian peran, koordinasi, monitoring, dan komitmen setelah kegiatan KKN berakhir. Karena itu, keberlanjutan program perlu diperkuat melalui penetapan pengelola lokal yang jelas, pembagian tanggung jawab

antarpihak, monitoring berkala, koordinasi lanjutan, serta pendampingan pada kegiatan yang masih berada pada tahap penguatan kapasitas

DEKLARASI

Kontribusi Penulis. *Septi Triyani* berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, penyusunan desain penelitian, serta pengembangan kerangka analisis terkait *collaborative governance* dan pemberdayaan masyarakat. *Ulima Ziila Zabrina* berperan dalam koordinasi pelaksanaan penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta penyusunan dan penyuntingan naskah artikel. *Ruchma Masriyah* berkontribusi dalam proses pengumpulan data, dokumentasi kegiatan, dan interpretasi hasil penelitian. *Annisa Eline Salsabila* berkontribusi dalam kajian literatur, pengolahan data, serta penyusunan bagian pembahasan penelitian. *Hafizh Muhammad Akbar* berperan dalam pengumpulan data empiris, validasi informasi lapangan, dan analisis temuan penelitian. *Muh Kemal Mursyidan Amin* berkontribusi dalam dokumentasi penelitian, pengorganisasian data, serta penyempurnaan substansi artikel. *Moh Sayful Zuhri* berkontribusi dalam peninjauan akhir naskah, penyesuaian format akademik, serta memastikan konsistensi hasil penelitian.

Pendanaan. Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan eksternal.

Konflik Kepentingan. Seluruh penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

Penggunaan Kecerdasan Buatan. Gemini AI digunakan untuk membantu memperdalam kajian penelitian, namun hasil akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Persetujuan Etik dan Informed Consent. Tidak berlaku.

Ketersediaan Data. Data pendukung penelitian sepenuhnya tersedia dalam basis data penulis.

Ucapan Terima Kasih. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, beserta seluruh masyarakat desa yang telah memberikan dukungan, keterbukaan, serta partisipasi aktif selama proses pelaksanaan KKN dan pengumpulan data penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak perguruan tinggi, dosen pembimbing, serta seluruh tim pelaksana KKN yang telah memberikan arahan, pendampingan, dan dukungan dalam proses perencanaan maupun implementasi program pemberdayaan masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada para pelaku UMKM, kelompok masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung proses kolaborasi multipihak, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal. Semoga kontribusi dan kerja sama dari seluruh pihak dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas masyarakat Desa Rawoh serta mendorong praktik pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, A., Jennifer, J., Huang, J. C., & Sebastian, J. C. (2021). Analysis of digital marketing adoption in Indonesian micro, small, and medium enterprises. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 308–328. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3173>

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cai, Z., Li, M., Zhu, Z., Wang, X., Huang, Y., Li, T., Gong, H., & Yan, M. (2023). Biological Degradation of Plastics and Microplastics: A Recent Perspective on Associated Mechanisms and Influencing Factors. *Microorganisms* 2023, Vol. 11, Page 1661, 11(7), 1661. <https://doi.org/10.3390/MICROORGANISMS11071661>
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Gender and capacity building: A multi-layered study of empowerment. *World Development*, 106, 207–219. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.024>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUR011>
- Iyoega, R. R., Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *PERSPEKTIF*, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>
- Kamkankaew, P., Sribenjachot, S., Wongmahatlek, J., Phattarowas, V., & Khumwongpin, S. (2022). Reconsidering the Mystery of Digital Marketing Strategy in the Technological Environment: Opportunities and Challenges in Digital Consumer Behavior. *International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews*, 2(4), 43–60. <https://doi.org/10.14456/JSASR.2022.29>
- Marchese, D., Reynolds, E., Bates, M. E., Morgan, H., Clark, S. S., & Linkov, I. (2018). Resilience and sustainability: Similarities and differences in environmental management applications. *Science of the Total Environment*, 613–614, 1275–1283. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.086>
- Pemerintah Kabupaten Grobogan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Grobogan. https://jdih.grobogan.go.id/ILDIS_31/common/dokumen/perdanomor8tahun2021tentangrencanapembangunanjangkamenengahdaerahkabupatengrobogantahun2021-2026.pdf
- Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying digital transformation paths in the business model of SMEs during the COVID-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), Article 104. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040104>
- Rachman, I., Maulana, Q., Soesanto, B., Khair, H., & Matsumoto, T. (2020). Participation of Leaders and Community in Solid Waste Management in Indonesia to Reduce Landfill Waste Load. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 4(2), 75–84. <https://doi.org/10.23969/JCBEEM.V4I2.3348>

- Sarjiyanto, S., Mulki, Y. A., & Istiqomah, N. (2024). The impact of typology capital on community empowerment programs: evidence from rural development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 17–35. <https://doi.org/10.18196/JESP.V25I1.20083>
- Srivastava, A. P., Mani, V., & Yadav, M. (2019). Evaluating the implications of stakeholder’s role towards sustainability of higher education. *Journal of Cleaner Production*, 240, 118270. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118270>
- Sujito, A., & Anggraini, N. W. (2025). Integration of Circular Economy Approaches and Community Participation in Waste Management Based on Campus-Village Partnerships. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 9(2), 129–146. <https://doi.org/10.14421/JPM.2025.092-01>
- Vihma, P., & Toikka, A. (2021). The limits of collaborative governance: The role of inter-group learning and trust in the case of the Estonian “Forest War.” *Environmental Policy and Governance*, 31(5), 403–416. <https://doi.org/10.1002/eet.1952>
- Yeboaa, C., Tetteh, E. K., Chollom, M. N., & Rathilal, S. (2025). Sustainable Solutions for Plastic Waste Mitigation in Sub-Saharan Africa: Challenges and Future Perspectives Review. *Polymers*, 17(11), 1521. <https://doi.org/10.3390/POLYM17111521/S1>